

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024

AUDITED



BALAI KIPM BANJARMASIN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai KIPM Banjarmasin adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Banjarmasin, 2025

Kepala,

Hafit Rahman, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN : www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin SURAT ELEKTRONIK bkikls2bjm@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Banjarmasin, Januari 2024

Kepala,

Hafit Rahman, S.Pi, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 29,555,000 atau mencapai 53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.52,960,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.5,766,260,929 atau mencapai 99.23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5,811,122,000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 16,835,723,220 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 25,069,045; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 16,802,035,696; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 8,618,479.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 261,727,350 dan Rp20,614,815,914.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 29,555,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp (6,130,938,682) sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 6,101,383,682. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 6,118,431,950 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 6,118,431,950.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp.20,767,599,191 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 6,118,431,950 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2,148,268,928 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 16,797,436,169.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Cat	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
B.1					
B.1	52.960.000	29.555.000	23.405.000	55,81	70.369.999
	52.960.000	29.555.000	23.405.000	55,81	70.369.999
B.2.					
B.3	3.039.233.000	3.038.969.188	263.812	99,99	5.120.765.275
B.4	2.771.889.000	2.727.291.741	44.597.259	98,39	3.430.467.801
B.5	-	-	-	0,00	326.216.900
B.6	-	-	-	-	-
	5.811.122.000	5.766.260.929	44.861.071	99,23	8.877.449.976

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KIPM BANJARMASIN
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.4	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	25.069.045	113.888.110
JUMLAH ASET LANCAR		25.069.045	113.888.110
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	12.431.711.000	14.422.138.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.255.383.615	9.301.909.631
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.634.886.200	6.436.355.487
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	276.361.500	319.220.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	15.650.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.796.306.619)	(9.812.761.871)
JUMLAH ASET TETAP		16.802.035.696	20.682.511.747
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.4	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.1	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	8.618.479	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		8.618.479	-
JUMLAH ASET		16.835.723.220	20.796.399.857
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.5	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	38.287.051	28.800.666
Utang yang Belum ditagihkan	C.5.2	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		38.287.051	28.800.666
JUMLAH KEWAJIBAN		38.287.051	28.800.666
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	16.797.436.169	20.767.599.191
JUMLAH EKUITAS		16.797.436.169	20.767.599.191

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	29.555.000	67.260.0
JUMLAH PENDAPATAN		29.555.000	67.260.0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.051.604.616	2.656.807.3
Beban Persediaan	D.3	162.786.400	72.270.1
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.471.206.312	857.073.9
Beban Pemeliharaan	D.5	731.717.313	707.823.5
Beban Perjalanan Dinas	D.6	440.005.794	306.154.6
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	273618247	323.846.9
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	
JUMLAH BEBAN		6.130.938.682	4.923.976.6
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.101.383.682)	(4.856.716.6
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(17.028.303)	
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		-	
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(19.965)	(6.048.4
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(19.965)	6.048.4
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(17.048.268)	(6.048.4
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6.118.431.950)	(4.862.765.0
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	
Beban Luar Biasa		-	
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	20.767.599.191	21.368.860.740
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.118.431.950)	(9.410.004.776)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.148.268.928	8.808.743.227
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.970.163.022)	(601.261.549)
EKUITAS AKHIR	E.6	16.797.436.169	20.767.599.191

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Banjarmasin

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- b. Fungsi :
 - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
 - pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya

Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di

Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Banjarmasin, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Satker Pelabuhan Trisakti, wilker Batulicin dan Wilket Kotabaru

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

- 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
- 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
- 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

TUJUAN :

“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.

SASARAN STRATEGIS :

- 1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
- 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
- 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*

4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*
5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Banjarmasin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai KIPM Banjarmasin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Banjarmasin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,173,055,000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	52,960,000	52,960,000
Jumlah Pendapatan	52,960,000	52,960,000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.377.308.000	3,039,233,000
Belanja Barang	3.432.154.000	2.771.889.000
Belanja Modal	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	9,809,462,000	5,811,122,000

Realisasi
Pendapatan
Rp. 29,555,000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 29,555,000 atau mencapai 56.09 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.52,960,000. Pendapatan Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	52,960,000	29,555,000	56.09

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan			
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	52,960,000	29,555,000	56.09

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya TA 2024 mengalami Penurunan 8.77 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Adanya Pemisahan antara BKIPM dan BKIHT.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	29,515,000	63,300,000	46.62
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	40,000	3,960,000	1,09
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	29,555,000	67,260,000	43.94

Realisasi Belanja
Rp 5,766,261,311

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai KIPM Banjarmasin pada TA 2024 adalah sebesar Rp 5,766,261,311 atau 99.23% dari anggaran belanja sebesar Rp 5,811,122,000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,039,233,000	3,038,969,570	99.99
Belanja Barang	2.771.889.000	2,727,291,741	90.89
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5,766,260,929	8,877,449,976	99.23
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	5,766,260,929	8,877,449,976	99.23

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami Penurunan dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya Jumlah pegawai yang mengakibatkan Jumlah Anggaran Berkurang dan berkurangnya jumlah pegawai yg naik pangkat.
2. Terdapat beberapaka kegiatan masih dalam pagu saldo blokir AA, sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.

**Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	3,038,969,188	5,120,765,275
Belanja Barang	2,727,291,741	3,430,467,801
Belanja Modal	-	326,216,900
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	5,766,260,929	8,877,449,976

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp.3,038,969,188*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3,038,969,188 dan Rp 5,120,765,275. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 16,94 persen dari TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,120,765,279	2,471,263,466	6,5
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	4,261,000	82,665,000	0,13
Jumlah Belanja Kotor	3,038,969,570	5,120,765,27	6.94
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	3,038,969,570	5,120,765,27	6.94

Belanja Barang
3,038,969,188

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 3,038,969,188 dan Rp.5,120,765,275. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami Penurunan 59.34% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Berkurangnya kegiatan di Balai KIPM Banjarmasin karena anggaran dan kegiatan di alihkan ke BKHIT,
2. Adanya saldo Blokir AA yang mengakibatkan Kegiatan belum dapat terealisasi,

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	1,114,634,064	1,171,339,851	(95.15)
Belanja Barang Non Operasional	13,389,000	15,081,000	(88.78)
Belanja Persediaan	74,635,000	9,727,800	(76.73)
Belanja Jasa	258,137,654	285,703,613	(90.35)
Belanja Pemeliharaan	693,266,513	715,731,448	(96.86)
Belanja Perjalanan Dinas	55,957,846	95,373,266	(58.67)
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	-

Jumlah Belanja Kotor	856,925,577	1,187,074,195	7.21
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	856,925,577	1,187,074,195	7.21

Belanja
Rp0

Modal

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.161,496,900. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan TA 2023 Karena Pada TA 2024 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	161,496,900	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	161,496,900	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	161,496,900	(100)

Belanja
Tanah Rp0

Modal

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-

Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp161,496,900. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung layanan perkantoran lebih kecil dari sebelumnya.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor	0	161,496,900	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	161,496,900	(100)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA

Jaringan Rp0

2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Aset Lancar
Rp191,458,870

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp75,000,000

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

Kas Lainnya dan

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 191,458,870 dan Rp 113,888,110.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.75,000,000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai		0
Bank BNI	75.000.000	0
Jumlah	75,000,000	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
	Jumlah	-	-

*Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
	Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-

Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	0
Jumlah	-	0

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	-	-

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp116,458,870

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 116,458,870 dan Rp.113,888,110 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	11,659,452	24,811,051
Bahan untuk Pemerliharaan	3,673,000	6,982,100
Suku Cadang	4,416,800	22,270,000
Bahan Baku	96,709,618	327,871,373
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	116,458,870	113,888,110

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp 20,682,511,747

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 20,682,511,747 dan Rp20,682,511,747.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai KIPM Banjarmasin berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp14,422,138,000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14,422,138,000 dan Rp14,422,138,000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	14,422,138,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-

Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Juni 2023	14,422,138,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	14,422,138,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Tanah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.869 m2	ia. yani, Km. 29,42n Yoes	11.749.282.000
2	992 m2	Stagen KotabaruYos Sudarso Bontang	1.166.499.000
3	560 m2	Jl. Rajawali Trisakti	823.928.000
4	510 m2	Jl. Angkasa No.16	682.429.000
Jumlah			14.422.138.000

Peralatan dan Mesin
Rp9,301,909,631

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 9,301,909,631 dan Rp9,904,378,183.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	18.118.215.802
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 30 Juni 2023	18.118.215.802
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(8,816,306,171)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	9,301,909,631

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp-; dan
Pembelian peralatan komputer senilai Rp0.
Pembelian Alat Rumah Tangga senilai Rp0.
Pembelian Alat Pengolahan senilai Rp 0.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp6,436,355,487

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6,436,355,487 dan Rp6,271,635,487.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	7.310.455.058
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 30 Juni 2023	7.310.455.058
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(874,099,571)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	6,436,355,487

Tidak Terdapat Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Banjarmasin

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp319.220.500

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 319.220.500 dan Rp319.220.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	441.576.629
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo Per 30 Juni 2023	441.576.629
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(122.356.129)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	319.220.500

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp15,650,000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15,650,000 dan Rp 15,650,000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	15.650.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 30 Juni 2023	15.650.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	15.650.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp9,812,761,871

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9,812,761,871 dan Rp.9,812,761,871.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

N o	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9,301,909,631	8,816,306,171	485.603.460
2.	Gedung dan	6,436,355,487	874,099,571	5.562.255.916

	Banguna n			
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringa n	319.220.500	122.356.129	196.864.371
4.	Aset Tetap Lainnya	15,650,000	-	15,650,000
	Jumlah	20,682,511,747	(9,812,761,871)	20,873,970,617

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Banjarmasin merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.
Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		

6.	-		
	Jumlah		

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
	Jumlah		

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2024
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Tagihan TPA			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		
---	---	--	--

Aset Lainnya

Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai KIPM Banjarmasin berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain-Lain

Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai KIPM Banjarmasin.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	<i>Software</i>			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp261,727,350

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp261,727,350 dan Rp28,800,666. Utang Pihak Ketiga Terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, 126,195,439 (Gaji PNS,Gaji P3K dan Gaji PPNPN bulan Bulan Juli 2024), Utang Yang Belum Ditagihkan Rp 60,531,911 dan Uang Muka dari KPPN Rp. 75.000.000.

Utang Muka dari KPPN
Rp75.000.000

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp75.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp126,195,439

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.126,195,439 dan Rp.28,800,666. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai KIPM Banjarmasin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang kepada Pihak Ketiga	126,195,439
Total		126,195,439

Utang Pihak Ketiga Terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, 126,195,439 (Gaji PNS 81.280.272, Gaji P3K 7.383.167 dan Gaji PPNPN bulan Rp. 37.532.000 Bulan Juli 2024.

Utang Yang Belum
Diterima Tagihannya
Rp 60,531,911

C.5.3. Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Utang Yang belum diterima Tagihannya pada satker balai KIPM Banjarmasin Sebesar Rp. 60,531,911 yang terdiri dari : Kuitansi yang Belum di SPM kan Sebesar 57.052.131 dan Gaji PJLP Bulan Juni 2024 BAST 29 Juni 2024 SPM Tanggal 1 Juli 2024 Sebesar Rp. 3,479,780.00

Tabel 26
Rincian Utang Yang belum diterima Tagihannya TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kuitansi yang Belum di SPM kan	57.052.131
2.	Gaji PJLP Bulan Juni 2024	3,479,780.
Total		60,531,911

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	
-	
-	
Jumlah	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-

Jumlah	-	-
---------------	---	---

Ekuitas
Rp20,612,243,267

C.7 Ekuitas
 Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20,612,243,267 dan Rp20,925,316,079. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp28,245,000

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.28,245,000 dan Rp33,440,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
 TA 2024 dan 2023
 (dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28,245,000	33,440,000	
Pendapatan Pendidikan	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	28,245,000	33,440,000	

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya serta Pendapatan Jasa Karantina Perikanan.

Beban Pegawai
Rp1,834,657,939

D.2 Beban Pegawai
 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,834,657,939 dan Rp2,656,807,390. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji	713,125,600	1,108,497,340	0,9
Beban Tunjangan-tunjangan	1.117.271.334	1.513.797.050	0,9
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	4.261.000	34.513.000	0,5
Jumlah Beban	1,834,657,939	2,656,807,390	6,9

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp18,278,475*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18,278,475 dan Rp72,270,174. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	18,201,475	18,201,475	
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	77,000	77,000	
Jumlah Beban	18,278,475	18,278,475	

*Beban Barang dan Jasa
Rp.615,316,650*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.615,316,650 dan Rp.857,073,937. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	366,244,661	433,940,371	0,84
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22,605,200	28,404,400	0,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	2,228,300	2,777,000	8,14
Beban Honor Operasional Satker	33.440.000	49,224,000	0,68
Beban Barang Operasional Lainnya	37,850,520	79,188,190	0,48
Beban Bahan	4,837,000	73,868,076	0,07
Beban Honor Output Kegiatan	2,040,000	3,400,000	0,60
Beban Barang Non Operasional Lainnya	21,230,496	24,136,130	0,88
Beban Langganan Listrik	66.666.770	91,352,886	0,73
Beban Langganan Telepon	515,172	515,189	1,00
Beban Langganan Air	8,201,387	6,202,195	1,32
Beban Sewa	25,000,000	25,000,000	100
Beban Jasa Lainnya	24,457,144	39,065,500	0,63
Jumlah Beban	615.316.650	857.073.937	0,71

Beban
Pemeliharaan
Rp300,240,668

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp300,240,668 dan Rp707,823,541. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya

pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169,645,900	199.211.700	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,682,268	76.850.519	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	10,912,500	23,185,900	
Beban Persediaan suku cadang	-	234,970,419	
Jumlah Beban	300,240,668	707,823,541	

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp162,984,789

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 162,984,789 dan Rp. 306,154,623. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	153.234.789	21.750.000	7,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000	94.176.833	0,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.555.029	190.227.790	0,47
Jumlah Beban	162,984,789	306,154,623	0.53

Beban Barang

untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp273,618,247

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 273,618,248 dan Rp. 601,684,259. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-	-	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Penjualan Alat Kantor	-	-	
Selisih Kurs	-	-	

Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp20,767,599,191

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20,767,599,191 dan Rp21,368,860,740.

Defisit LO
Rp
(6,118,431,950)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp (6,118,431,950) dan (9,410,004,776) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas Rp.
2,148,268,928

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2,747,897,562 dan Rp.8,808,743,227.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 31

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(29,555,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,766,260,929
Transfer Masuk	80.900.500
Transfer Keluar	(3.669.337.501)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	2,148,268,928

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(29,555,000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 5,766,260,929.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.80.900.500 merupakan Sertifikat dari Sekretariat BPPMKHP dan Aset berupa PC dan Laptop dari UPT BPPMHKP Makasar terdiri dari:

Tabel 32

Transfer Masuk TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Balai KIPM Makasar	79.508.000
2.	Health Certificate	Sekretariat Badan	1,392,500
Jumlah			80.900.500

Tidak Terdapat Transfer Keluar sebesar Rp. 3.669.337.501 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.merupakan Peralihan status Aset ke BKI yang terdiri dari

Tabel 33

Transfer Keular TA 2024

No.	Jenis	Mutasi Keluar	Nilai
-----	-------	---------------	-------

1.	Tanah, Gedung, Peralatan dan Mesin	Balai KIPM Makasar	7,333,923,228
2.	Akumulasi Penyusutan		3.664.585.727
Jumlah			3.669.337.501

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Pengesahan Hibah Langsung TA 2024

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp.
16,797,436,169

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 16,797,436,169 dan Rp. 20,767,599,191

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat Kejadian-kejadian Penting setelah tanggal Neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan lingkup BPPMHKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp.308.000.000 dan realisasi senilai

Rp.276.730.341

atau 89,84% dari pagu, dengan rincian disajikan pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Satker Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan (teralisasi) dikarenakan msh dalam tahap saldo blokir

- 3990.PDF - Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- 7010.PBR - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan

Tabel 35
Program Prioritas Nasional TA 2024

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
3989.PDC - Sertifikasi Produk	45,000,000	41,830,405	92.96
3989.PDF Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	80.000.000	61,830,132.	77.29
3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	60.000.000	59,967,925.	99.95
3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12.000.000	11,252,893	93.77
7010.PBR - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	75.000.000	66,948,365.00	89.26
7010.PDD.001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance ses	8.500.000	8,492,325.00	99.91
7010.PDD.001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance ses	19.000.000	18,999,996.00	100
7010.QIA - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	8.500.000	7,408,300.00	87.16

Total	308.000.000	276.730.341	89.84%
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/06.0/KU.110/I/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Balai KIPM Banjarmasin sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Rachmiyati,S.E
 Pejabat Penandatangan/Penguji SPM: Untung Ifriansyah,
 S.Sos
 Bendahara Pengeluaran : Yusniati Aritonang,
 A.Md.,S.E